

Katalog BPS : 9302002.11

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO Menurut Pengeluaran Provinsi Aceh

Triwulan II - 2015

Tahun Dasar 2010



<http://aceh.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI ACEH**

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
Menurut Pengeluaran Provinsi Aceh

Triwulan II - 2015

Tahun Dasar 2010

<http://aceh.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI ACEH

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

MENURUT PENGELUARAN PROVINSI ACEH

TRIWULAN II TAHUN 2015

Katalog BPS : 9302002.11
Nomor Publikasi : 11552.1504
Ukuran Buku : 21 x 14,8 cm
Jumlah Halaman : ii + 28 Halaman

Penanggung Jawab/Pengarah : Hermanto
Editor : Andariati Afrida, Haifa Sari
Penulis : Opan Fauzan Hamdan
Pengolah Data & Grafik : Opan Fauzan Hamdan
Penyunting dan Finalisasi : Haifa Sari
Cover : Opan Fauzan Hamdan

Diterbitkan Oleh :

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI ACEH

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut pengeluaran merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk melihat gambaran kinerja perekonomian secara makro suatu wilayah dalam periode tertentu.

Untuk itu, Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh menerbitkan Publikasi Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran Provinsi Aceh Triwulan II Tahun 2015 dalam rangka mendiseminasikan kajian tentang gambaran kinerja perekonomian secara lebih dini dan lengkap pada periode tersebut. Mulai triwulan IV tahun 2014, penghitungan PDRB akan menggunakan tahun dasar baru 2010 berbasis SNA 2008, dimana sebelumnya menggunakan tahun dasar 2000. Perubahan tahun dasar ini perlu dilakukan karena selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada tatanan global dan lokal yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional dan regional.

Perlu disampaikan bahwa angka-angka yang terdapat pada publikasi ini masih bersifat angka sementara dan akan dilakukan perbaikan pada triwulan berikutnya.

Akhirnya diucapkan terima kasih kepada semua pihak, semoga publikasi ini dapat bermanfaat.

Banda Aceh, September 2015
Kepala BPS Provinsi Aceh

Hermanto

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Informasi perkembangan perekonomian sangat diperlukan untuk menyusun perencanaan dan melakukan evaluasi kinerja pemerintahan. Salah satu data statistik yang dibutuhkan untuk kegiatan perencanaan dan evaluasi ekonomi makro adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dengan tersedianya data PDRB, strategi dan kebijaksanaan pembangunan perekonomian yang telah diambil pemerintah dapat dievaluasi, dan diperbaiki atau dilanjutkan di masa mendatang.

Hakekat pembangunan ekonomi adalah serangkaian kegiatan usaha dan kebijaksanaan yang bertujuan untuk:

- a. Peningkatan taraf hidup masyarakat.
- b. Perluasan kesempatan kerja.
- c. Pemerataan pembagian pendapatan masyarakat.
- d. Peningkatan hubungan ekonomi regional.

e. Pergeseran ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier

Dengan kata lain arah pembangunan ekonomi adalah mengusahakan pendapatan masyarakat naik dengan distribusi yang semakin merata.

Kemudian untuk mengetahui tingkat pertumbuhan pendapatan masyarakat suatu wilayah perlu disajikan pendapatan regional secara berkala yang dapat digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan regional/daerah khususnya di bidang ekonomi.

Sementara itu dalam beberapa buku referensi ditegaskan bahwa pembangunan dan pertumbuhan ekonomi lebih ditentukan oleh faktor permintaan daripada penyediaan. Perkembangan yang terjadi sebagai akibat dari perubahan gaya hidup dan perilaku konsumsi dari sebagian masyarakat modern telah mendorong produsen untuk meningkatkan

produknya baik secara kuantitas maupun kualitas, yang pada akhirnya mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga dibutuhkan parameter untuk memantau perkembangan permintaan atau konsumsi masyarakat luas yaitu dengan melihat perkembangan nilai PDRB menurut Pengeluaran.

1.2 Perubahan Tahun Dasar PDB/PDRB Berbasis SNA 2008

Penghitungan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mulai triwulan IV tahun 2014 akan menggunakan tahun dasar baru 2010 berbasis SNA 2008, dimana sebelumnya menggunakan tahun dasar 2000. Perubahan tahun dasar ini perlu dilakukan karena selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada tatanan global dan lokal yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional.

Krisis finansial global yang terjadi pada tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional

dan meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan contoh perubahan yang perlu diadaptasi dalam mekanisme pencatatan statistik nasional. Salah satu bentuk adaptasi pencatatan statistik nasional adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB Indonesia dari tahun 2000 ke 2010. Perubahan tahun dasar PDB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam 2008 *System of National Account* (SNA 2008) melalui penyusunan *Supply and Use Tables* (SUT).

Perubahan tahun dasar PDB ini dilakukan secara bersamaan dengan penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi untuk menjaga konsistensi hasil penghitungan. Adapun tahun 2010 dipilih sebagai tahun dasar baru menggantikan tahun dasar 2000 karena beberapa alasan berikut :

- a. Rekomendasi PBB dalam SNA1993 (*part* 16;76), bahwa pergantian tahun dasar penghitungan PDB dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun agar dapat memberikan gambaran perkembangan

- ekonomi sesuai dengan kondisi terkini.
- b. Teridentifikasi pembaharuan konsep, sumber data dan metodologi berbasis SNA 2008 yang akan diimplementasikan dalam penyusunan PDB tahun dasar 2010.
 - c. Pada tahun 2010, perekonomian Indonesia dipandang relatif stabil dengan laju pertumbuhan PDB mencapai 6,10 persen dan tingkat inflasi mencapai 6,96 persen. Meskipun pada tahun 2009 perekonomian Indonesia terimbas krisis finansial global.
 - d. Perubahan struktur ekonomi nasional dari tahun 2000 dan 2010 dipandang cukup signifikan akibat perubahan dibidang informasi dan teknologi serta transportasi yang berpengaruh terhadap pola distribusi dan munculnya produk-produk baru.
 - e. Tersedianya Tabel Penyediaan dan Penggunaan (TPP) Indonesia 2010 yang menggambarkan keseimbangan transaksi *supply* dan *use* atas berbagai produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu industri. TPP akan dihasilkan data PDB yang konsisten menurut 3 (tiga) pendekatan yaitu PDB menurut lapangan usaha, penggunaan dan pendapatan.
 - f. Tersedianya neraca produksi menurut sektor institusi selain neraca produksi menurut lapangan usaha yang diturunkan dari *Full Sequence of Account* (FSA) 2010.
 - g. Tersedianya koresponden/konversi klasifikasi antara klasifikasi menurut lapangan usaha (KBLI2009) dengan Klasifikasi Baku Komoditi Indonesia (KBKI2010) dan antara Kode *Harmonized System* (HS) dengan KBLI2009 untuk menyusun TPP Indonesia 2010.
 - h. Tersedianya deflator baru untuk penghitungan PDB yaitu Indeks Harga Produsen (*Producers Price Index /PPI*).
 - i. Tersedianya hasil Sensus Penduduk tahun 2010 (SP2010) yang dapat digunakan sebagai

basis analisis, seperti data jumlah penduduk dan ketenagakerjaan.

1.3 Sistem Neraca Nasional 2008 (SNA2008)

System of National Accounts 2008 (SNA 2008) atau Sistem Neraca Nasional 2008 adalah standar rekomendasi internasional tentang bagaimana menyusun ukuran aktivitas ekonomi yang sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi yang dimaksud terkait dengan penggunaan konsep, definisi, klasifikasi, dan aturan neraca berstandar internasional. Dalam sejarahnya, SNA2008 merupakan versi yang kelima, dimana versi sebelumnya adalah SNA 1947, SNA 1953, SNA 1968, dan SNA 1993.

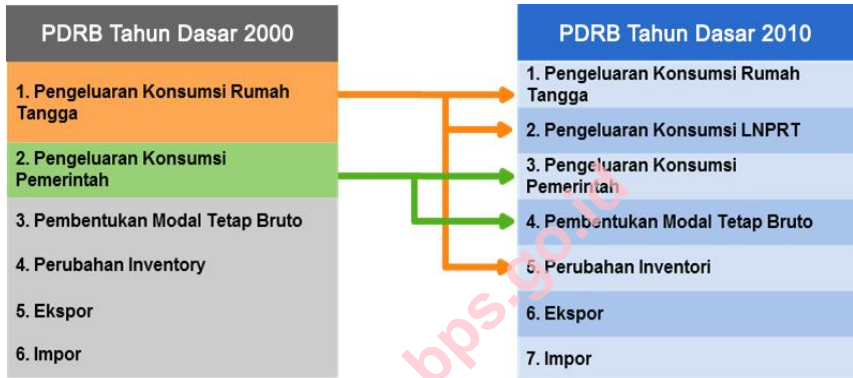
SNA merupakan sebuah alat utama untuk mengevaluasi, menganalisis, dan meramal fenomena ekonomi suatu negara, yaitu produksi, konsumsi, akumulasi, pendapatan, dan kekayaan. Dengan menggunakan informasi dari SNA, fenomena ekonomi dapat dengan lebih baik dijelaskan dan

dimengerti. Selain itu, SNA juga digunakan untuk mengkoordinasikan *framework* untuk seluruh statistik lainnya (*central statistical framework*) sehingga diperoleh definisi dan data yang konsisten.

SNA telah digunakan untuk laporan internasional tentang data neraca nasional yang telah sesuai dengan standar, konsep, definisi, dan klasifikasi yang diterima secara internasional (*international comparisons*).

Gambar 1.

Perbandingan klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran



1.4 Ruang Lingkup

1.4.1 Konsumsi Rumah Tangga

Pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup semua pengeluaran rumah tangga atas barang dan jasa untuk tujuan konsumsi, termasuk barang/ jasa yang dibarter, diterima dalam bentuk natural, atau diproduksi sendiri. Barang dan jasa yang dimaksud antara lain:

1. Segala jenis bahan makanan dan minuman baik mentah maupun bahan jadi, termasuk minuman beralkohol, tembakau dan rokok

2. Perumahan berikut fasilitas perumahan seperti biaya sewa/kontrak rumah, bahan bakar, rekening telpon, listrik dan air. Termasuk juga pengeluaran untuk imputasi sewa rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*). Sedangkan pembelian rumah tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga
3. Segala jenis bahan pakaian, pakaian jadi, alas kaki dan tutup kepala
4. Barang tahan lama seperti mobil, motor, kulkas, meubel, TV, alat-alat dapur, mainan anak, alat-alat

olahraga, binatang peliharaan, dan barang tahan lama lainnya

5. Barang lainnya seperti bahan-bahan untuk kebersihan (sabun mandi, sampo dan sejenisnya), bahan kecantikan (kosmetik, lulur, bedak, lipstik dan sejenisnya), obat-obatan, vitamin, buku, alat tulis, surat kabar, kertas pembersih dan sebagainya

Jasa-jasa seperti jasa kesehatan (biaya rumah sakit, dokter, imunisasi dan sejenisnya), jasa pendidikan (biaya sekolah, kursus dan sejenisnya), ongkos transportasi, perbaikan kendaraan, biaya hotel, tiket bioskop, tiket tempat rekreasi, biaya pembantu rumah tangga, tukang kebun, *baby sitter* dan jasa lainnya.

Pada tahun dasar baru 2010, konsumsi rumah tangga tidak termasuk pembelian dengan motif *store of value* (emas perhiasan, barang koleksi seperti lukisan, barang antik, dsj), perbaikan kecil rumah tinggal, dan konsumsi LNPRT, karena konsumsi LNPRT sudah menjadi komponen tersendiri.

Untuk memperkirakan besarnya konsumsi rumah tangga, digunakan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) sebagai data pokok.

Selanjutnya penyempurnaan estimasi dilakukan melalui proses rekonsiliasi.

Perkiraan besarnya konsumsi rumahtangga didasarkan pada data Susenas, penduduk pertengahan tahun, serta Indeks Harga Konsumen (IHK). Untuk perkiraan konsumsi pada tahun di mana data Susenas belum tersedia digunakan model elastisitas pendapatan terhadap perubahan permintaan barang-barang konsumsi.

1.4.2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT

Pengeluaran lembaga non profit yang melayani rumah tangga (LNPRT) merupakan pengeluaran atas barang dan jasa dalam rangka melaksanakan aktivitas pelayanan. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

- a. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis, barang cetakan, pembayaran listrik, air, telepon, teleks, faksimili, biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar, perjanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor, dll.

- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh : PBB, STNK, BBN, dll.

Jenis lembaga yang termasuk LNPRT yaitu :

1. Organisasi kemasyarakatan (Ormas),
2. Organisasi sosial (Orsos),
3. Organisasi Profesi (Orprof),
4. Perkumpulan sosial/ kebudayaan/ olahraga/ hobi,
5. Lembaga swadaya masyarakat,
6. Lembaga keagamaan,
7. Organisasi bantuan kemanusiaan/ beasiswa.

Sedangkan kegiatan utama yang dilakukan oleh LNPRT berdasarkan tujuan utamanya dibedakan menjadi 9, yaitu :

1. Perumahan,
2. Kesehatan,
3. Rekreasi dan Kebudayaan,
4. Pendidikan,
5. Perlindungan/Jaminan sosial,
6. Keagamaan,

7. Partai politik, Organisasi buruh dan Organisasi profesi,
8. Lingkungan hidup,
9. Jasa-Jasa

1.4.3. Konsumsi Pemerintah

Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas produksi maupun aktivitas investasi. Untuk sektor pemerintah, besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) sama dengan output pemerintah. Untuk itu PK-P mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, serta perkiraan penyusutan barang modal, dikurangi nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan. Yang juga termasuk PK-P adalah *social transfer in kind purchased market production*. Definisi ini sejalan dengan definisi dalam SNA 1968, yang menyebutkan bahwa pengeluaran konsumsi akhir pemerintah ekuivalen dengan nilai barang dan jasa yang

diproduksi oleh pemerintah untuk dikonsumsi sendiri.

Seluruh pengeluaran konsumsi pemerintah dapat diklasifikasikan menurut beberapa cara, dalam PDRB series baru ini PK-P diklasifikasikan berdasarkan pengeluaran pemerintah kolektif dan individu.

1.4.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan modal tetap bruto (PMTB) mencakup pembuatan dan pembelian barang-barang modal baru dari dalam negeri dan barang modal baru ataupun bekas dari luar negeri. Barang modal juga diartikan sebagai barang atau peralatan yang digunakan dalam proses produksi dan biasanya mempunyai umur pemakaian satu tahun atau lebih. Barang yang tidak diproduksi kembali, seperti tanah dan cadangan mineral, tidak termasuk dalam pembentukan modal tetap bruto. Pembentukan modal tetap bruto mencakup:

1. Pembentukan modal tetap berupa bangunan atau konstruksi terdiri dari :
 - a. Bangunan tempat tinggal

- b. Bangunan bukan tempat tinggal
- c. Bangunan atau konstruksi lainnya seperti; jalan, jembatan, irigasi, pembangkit tenaga listrik dan jaringannya, instalasi telekomunikasi, pemancar TV, pelabuhan, terminal, jaringan pipa untuk minyak, gas dan air dan monument.
- d. Perbaikan besar-besaran dari bangunan tersebut di atas.

Pembentukan modal berupa bangunan/konstruksi dinilai sesuai dengan output bangunan yaitu nilai seluruh pekerjaan bangunan pada satu tahun tertentu tanpa memperhatikan bangunan tersebut sudah selesai atau belum.

2. Pembentukan modal tetap non bangunan berupa mesin dan alat perlengkapan terdiri dari :
 - a. Alat-alat transpor, seperti kapal laut, kapal terbang, kereta api, bus, truk, motor, dan lain lain,
 - b. Mesin-mesin dan alat-alat perlengkapan untuk pertanian,
 - c. Mesin-mesin dan alat perlengkapan untuk industri, listrik dan pertambangan, mesin-mesin dan

alat-alat perlengkapan untuk pembuatan jalan, jembatan dan lain-lain,

d. Mesin-mesin dan perabot untuk perlengkapan kantor, toko, hotel, restoran, rumah dan lain-lain.

Mesin-mesin dan alat-alat perlengkapan yang sedang dalam proses pembuatan tidak dimasukkan dalam perhitungan pembentukan modal tetap bruto, tetapi merupakan stok dari produsennya.

3. Budidaya sumber daya hayati.

4. Produk kekayaan intelektual meliputi : *Research and development*, eksplorasi dan evaluasi mineral, perangkat lunak komputer dan database, karya hiburan, tulisan, dan seni, produk kekayaan intelektual lainnya.

5. Sistem persenjataan.

6. Perluasan perkebunan dan penanaman baru untuk tanaman keras. Yang dimaksud dengan tanaman keras adalah tanaman yang hasilnya baru akan diperoleh setelah berumur satu tahun atau lebih. Termasuk juga pengeluaran yang dilakukan oleh perkebunan besar selama perkebunan itu belum

mendatangkan hasil (berproduksi) dan kegiatan penanaman kembali (*reboisasi*) yang dilakukan oleh perusahaan pemerintah dan oleh pemerintah sendiri.

7. Penambahan ternak yang khusus dipelihara untuk diambil susu dan bulunya atau untuk dipakai tenaganya dan sebagainya, kecuali ternak yang dipelihara untuk dipotong.

8. Margin pedagang atau makelar, jasa pelayanan dan ongkos pemindahan hak milik dalam transaksi jual beli tanah, sumber mineral, hak pengusaha hutan, hak paten, hak cipta dan barang modal bekas tercakup dalam pembentukan modal tetap.

9. Barang modal lainnya.

1.4.5. Perubahan Inventori

Inventori merupakan persediaan barang pada unit institusi, yang belum atau tidak digunakan dalam proses produksi, atau belum selesai diproduksi, atau belum selesai diproses, atau belum terjual. Sedangkan perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan

tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Pada prinsipnya inventori merupakan persediaan bahan baku, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dikuasai oleh berbagai pelaku ekonomi baik untuk keperluan produksi maupun konsumsi. Barang-barang inventori ini akan digunakan lebih lanjut dalam proses produksi baik sebagai input antara atau konsumsi akhir. Klasifikasi inventori menurut jenis barang adalah sebagai berikut:

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi.
- b. Berbagai jenis bahan baku dan penolong (*material & supplies*), yaitu semua bahan, komponen atau penyediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi.
- c. Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli.
- d. Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai).
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual.
- f. Ternak untuk tujuan dipotong.
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan.
- h. Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

1.4.6. Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri

Ekspor barang dan jasa luar negeri merupakan nilai transaksi pemindahan kepemilikan ekonomi dalam bentuk barang dan jasa antara residen suatu negara dengan non-residen (dalam harga f.o.b). Nilai ekspor barang luar negeri mencakup *un-recorded transaction dan direct purchase non-residen* di Indonesia. Sedangkan ekspor jasa mencakup dua belas sektor jasa

(BOP Manual 6 sama dengan SNA 2008). Sumber data yang digunakan diantaranya adalah Statistik ekspor, Statistik Pariwisata, Statistik *Inbound* dan Neraca Pembayaran Indonesia.

1.4.7 Impor Barang dan Jasa Luar Negeri

Impor barang luar negeri merupakan nilai transaksi ekonomi (pembelian, barter, *gifts/grants*) dalam bentuk barang antara non-residen dan residen suatu negara. Sedangkan impor jasa luar negeri merupakan nilai transaksi alih kepemilikan ekonomi dalam bentuk jasa antara non-residen dengan residen suatu negara. Impor barang luar negeri mencakup *un-recorded transaction, direct purchase*

penduduk Indonesia di luar negeri, impor sewa beli dan kawasan berikat nasional (KBN). Sedangkan untuk impor jasa luar negeri mencakup dua belas sektor jasa (BOP manual 6 sama dengan SNA 2008). Sumber data yang digunakan terdiri dari Statistik impor, Statistik Pariwisata, Statistik *Outbound* dan Neraca Pembayaran Indonesia.

1.4.8 Net Ekspor antar Daerah

Nilai net ekspor antar daerah merupakan selisih nilai ekspor dan impor antar daerah. Ekspor dan impor antar daerah merupakan nilai transaksi alih kepemilikan ekonomi dalam bentuk barang dan jasa antara non-residen dengan residen suatu daerah.

II. TINJAUAN PDRB

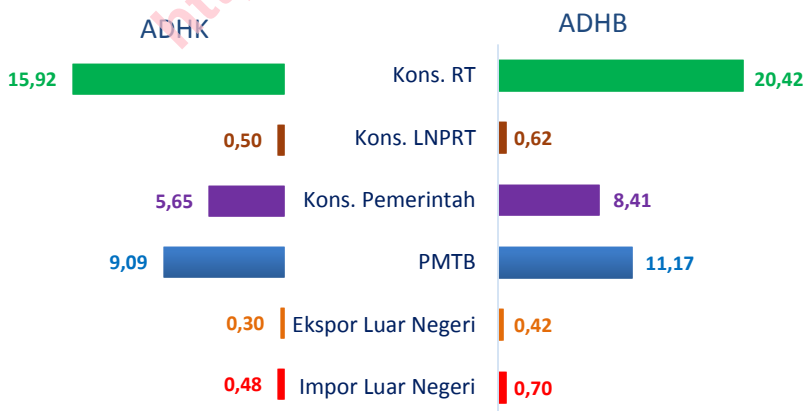
2.1 Nilai PDRB

Jika dilihat dari sisi pengeluaran, komponen konsumsi rumah tangga masih mendominasi nilai PDRB ADHB Aceh di triwulan II-2015 yaitu sebesar 20,42 triliun rupiah dan 15,92 triliun rupiah pada PDRB ADHK 2010. Komponen PMTB menjadi komponen terbesar kedua dengan nilai ADHB sebesar 11,17 triliun rupiah dan ADHK 2010 sebesar 9,09 triliun rupiah. Selanjutnya pada komponen konsumsi

pemerintah, nilai PDRB ADHB sebesar 8,41 triliun rupiah dengan ADHK 2010 sebesar 5,65 triliun rupiah. Nilai ekspor luar negeri ADHB sebesar 0,42 triliun rupiah dengan ADHK 2010 sebesar 0,30 triliun rupiah. Komponen impor luar negeri sebesar 0,70 triliun rupiah dengan ADHK 2010 sebesar 0,48 triliun rupiah. Komponen konsumsi LNPRT di triwulan II-2015 sebesar 0,62 triliun rupiah pada ADHB dan 0,50 triliun rupiah pada ADHK 2010 (gambar 2).

Gambar 2.

Nilai PDRB ADHB dan ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Triwulan II 2015 (triliun rupiah)



2.2 Pertumbuhan Ekonomi

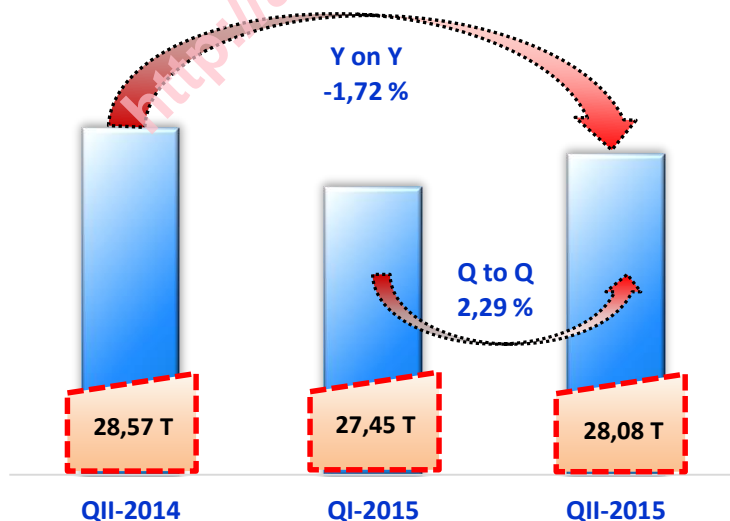
Tinjauan perkembangan PDRB secara triwulanan (*q-to-q*) menggambarkan pertumbuhan ekonomi Aceh pada triwulan II tahun 2015 dibandingkan triwulan I tahun 2015 berdasarkan ADHK 2010. Pertumbuhan secara triwulanan terlihat cukup menggembirakan, dimana perekonomian Aceh triwulan II-2015 mampu tumbuh

sebesar 2,29 persen dengan nilai PDRB ADHK 2010 sebesar 28,08 trilliun rupiah.

Pertumbuhan ekonomi Aceh *year on year (y-on-y)* triwulan II-2015 yaitu nilai PDRB ADHK 2010 pada triwulan II-2015 dibandingkan dengan triwulan II-2014. Berbeda dengan pertumbuhan *q-to-q*, pertumbuhan ekonomi Aceh secara *year on year* mengalami penurunan sebesar 1,72 persen (gambar 3).

Gambar 3.

Nilai PDRB ADHK 2010 dan Laju pertumbuhan *q-to-q* dan *y-on-y*



PDRB MENURUT PENGELUARAN

3.1 Laju Pertumbuhan *y-on-y*

Secara umum sudah dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Aceh secara *y-on-y* triwulan II 2015 turun sebesar 1,72 persen. Jika ditinjau berdasarkan komponen PDRB menurut pengeluaran, menurunnya nilai ekspor luar negeri menjadi penyebab melemahnya perekonomian Aceh. Meskipun ekspor jasa luar negeri meningkat sebesar 29,47 persen, namun rendahnya nilai ekspor barang hingga minus 88,17 persen menyebabkan nilai ekspor luar negeri Aceh turun mencapai minus 80,47 persen. Merosotnya nilai ekspor barang ini terkait dengan berhentinya kegiatan produksi dari kilang gas alam cair (LNG) PT Arun NGL sejak Oktober 2014.

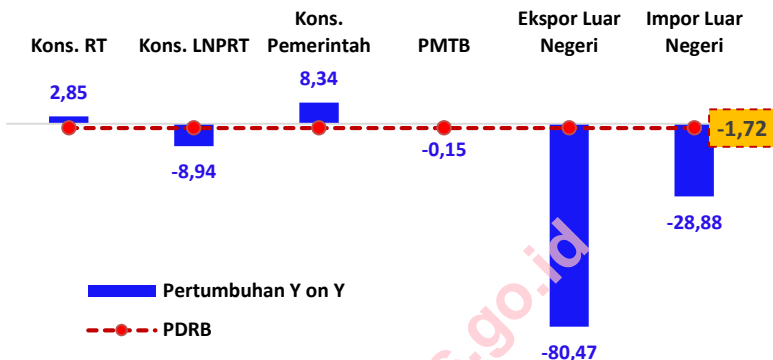
Pengeluaran konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPR) secara *y-on-y* juga turun sebesar 8,94 persen. Menurunnya nilai konsumsi tersebut terkait dengan kegiatan pemilu legislatif dan pemilu pasangan presiden-wakil presiden di

tahun 2014, sehingga jika dibandingkan dengan konsumsi di triwulan II-2014, konsumsi LNPR pada triwulan II-2015 jelas lebih rendah.

Impor luar negeri Aceh di triwulan II-2015 turun sebesar 28,88 persen dibandingkan triwulan II-2014, ini merupakan hal positif dalam perdagangan luar negeri Aceh karena impor merupakan komponen pengurang dalam penghitungan PDRB. Pengeluaran konsumsi rumah tangga tumbuh tidak terlalu tinggi sebesar 2,85 persen. Pertumbuhan yang cukup signifikan pada konsumsi rumah tangga terlihat pada sub-komponen perabotan, peralatan rumah tangga, dan pemeliharaan rutin rumah yang tumbuh sebesar 4,92 persen serta sub-komponen pakaian yang tumbuh sebesar 4,42 persen. Hal ini karena bulan ramadhan jatuh lebih cepat di triwulan II-2015 yaitu hampir dua minggu. Pengeluaran konsumsi pemerintah juga mampu tumbuh sebesar 8,34 persen, nilai ini didorong oleh meningkatnya konsumsi individu yang mencapai 31,67 persen (gambar 4).

Gambar 4.

Laju Pertumbuhan *y-on-y* PDRB Menurut Pengeluaran, Triwulan II 2015 (persen)



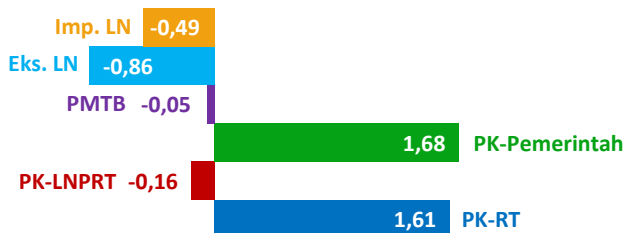
3.2 Sumber Pertumbuhan Ekonomi

Bila dilihat dari sumber penciptaan pertumbuhan ekonomi Aceh (*y-on-y*) triwulan II-2015, konsumsi pemerintah dan konsumsi rumah tangga merupakan dua komponen dengan sumber pertumbuhan ekonomi paling tinggi yaitu sebesar 1,68 persen dan 1,61 persen. Ini berarti konsumsi pemerintah

dan konsumsi rumah tangga memiliki pengaruh yang tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh secara *y-on-y*. Meskipun demikian, kedua komponen tersebut belum mampu membuat pertumbuhan ekonomi Aceh menjadi positif, hal tersebut dikarenakan komponen yang lain memiliki sumber pertumbuhan yang negatif (gambar 5).

Gambar 5.

Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran, Triwulan II 2015



3.3 Laju Pertumbuhan *c-to-c* dan Distribusi PDRB

Secara kumulatif (*c-to-c*), pertumbuhan ekonomi Aceh pada semester I-2015 juga belum menggembirakan, perekonomian Aceh turun sebesar 1,92 persen dibandingkan dengan semester I-2014. Melambatnya pertumbuhan ekonomi di semester ganjil 2015 disebabkan oleh turunnya pertumbuhan beberapa komponen pengeluaran, terutama komponen ekspor luar negeri yang menurun hingga mencapai minus 67,74 persen. Penurunan nilai ekspor tersebut masih terkait dengan berhentinya kegiatan produksi LNG PT Arun yang berdampak signifikan pada nilai ekspor luar negeri Aceh, sehingga secara kumulatif nilai ekspor migas pada semester I-2015 lebih rendah dibandingkan semester I-2014.

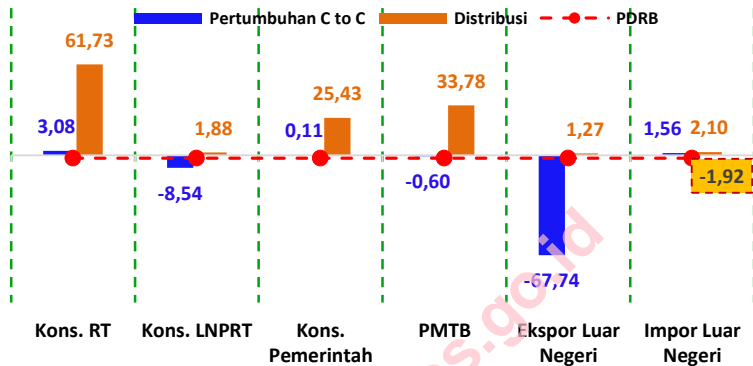
Nilai konsumsi dari LNPRT di semester ini juga menurun sebesar 8,54 persen. Menurunnya nilai konsumsi tersebut masih terkait dengan kegiatan pesta pemilu 2014, sehingga konsumsi kumulatif dari LNPRT di semester ini juga

lebih rendah dari semester I-2014. Pembentukan modal tetap bruto (PMTB) yang merupakan komponen dengan kontribusi kedua terbesar dalam PDRB Aceh, juga menurun sebesar 0,60 persen. Nilai impor luar negeri yang merupakan komponen pengurang PDRB meningkat sebesar 1,56 persen, terutama pada impor barang yang mencapai 11,23 persen.

Penyerapan anggaran pemerintah pada semester I-2015 terlihat lebih baik dari semester I-2014. Pengeluaran konsumsi pemerintah naik sebesar 0,11 persen dengan kontribusi pada PDRB sebesar 25,43 persen. Pengeluaran konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 3,08 persen di triwulan I-2015. Meskipun pertumbuhannya relatif konstan, PKRT masih menjadi komponen utama dalam perekonomian Aceh dengan distribusi sebesar 61,73 persen. Meskipun ekspor luar negeri mengalami pertumbuhan negatif yang tinggi, namun secara distribusi komponen ini memiliki nilai paling kecil yaitu sebesar 1,27 persen (gambar 6).

Gambar 6.

Laju Pertumbuhan *c-to-c* dan Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran, Triwulan II 2015 (persen)



3.3 Laju Pertumbuhan *q-to-q*

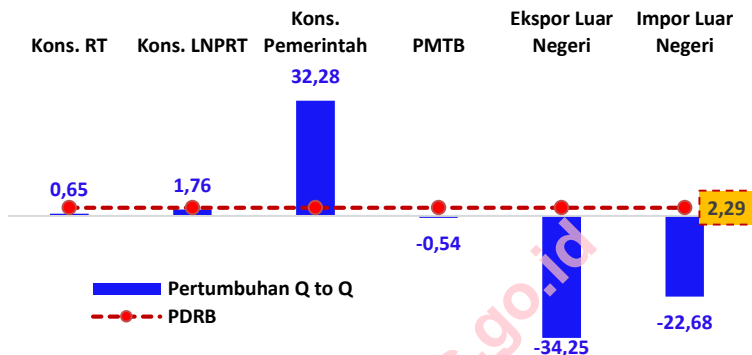
Pertumbuhan ekonomi yang menggembirakan terlihat secara *q-to-q*. Ekonomi Aceh pada triwulan II-2015 mampu tumbuh sebesar 2,29 persen dibandingkan triwulan I-2015. Namun masih ada beberapa komponen yang mengalami penurunan. Komponen PMTB secara *q-to-q* turun relatif rendah sebesar 0,54 persen sedangkan ekspor luar negeri juga turun sebesar 34,25 persen. Hal ini disebabkan oleh menurunnya ekspor bahan kimia anorganik dan tidak adanya ekspor kondensat pada triwulan II-2015.

Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada komponen

konsumsi pemerintah yaitu sebesar 32,28 persen. Hal ini disebabkan oleh penyerapan anggaran pemerintah yang lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya, baik untuk konsumsi kolektif maupun individu. Banyaknya kegiatan amal dan keagamaan menjelang bulan ramadhan serta kegiatan sosial untuk pengungsi *Rohingya* juga mampu meningkatkan konsumsi LNPRT sebesar 1,76 persen. Konsumsi rumah tangga juga tumbuh sebesar 0,65 persen, peningkatan konsumsi ini terkait dengan kegiatan konsumsi menjelang bulan ramadhan dan adanya liburan sekolah. Sedangkan impor luar negeri turun sebesar 22,68 persen (gambar 7).

Gambar 7.

Laju Pertumbuhan *q-to-q* Menurut Pengeluaran, Triwulan II 2015 (persen)



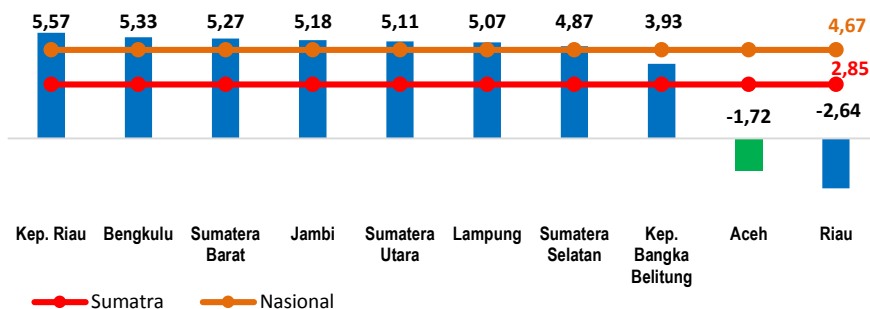
3.4 Pertumbuhan Ekonomi Sumatera

Dibandingkan dengan triwulan II-2014 atau secara *y-on-y*, pertumbuhan ekonomi Sumatera triwulan II-2015 meningkat sebesar 2,85 persen. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Nasional tumbuh lebih tinggi yaitu

sebesar 4,67 persen. Ekonomi Aceh mengalami penurunan di triwulan II-2015 dibandingkan dengan triwulan II-2014 sebesar 1,72 persen, nilai ini lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Riau yang juga turun sebesar 2,64 persen.

Gambar 8.

Pertumbuhan PDRB *y-on-y* se-Sumatera Triwulan II-2015

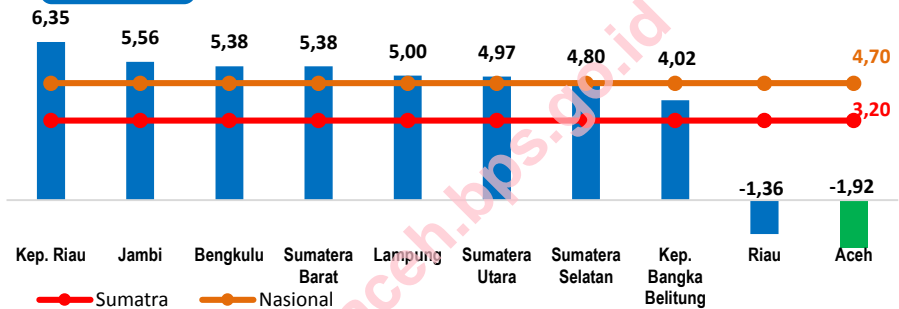


Secara kumulatif (*c-to-c*) pertumbuhan ekonomi Nasional pada semester I-2015 meningkat sebesar 4,70 persen dari semester I-2014. Nilai ini masih lebih tinggi dari pertumbuhan

ekonomi Sumatera yang sebesar 3,20 persen. Perekonomian Aceh sendiri masih melambat 1,92 persen pada semester I-2015 dan menempati urutan terakhir se-Sumatera.

Gambar 9.

Pertumbuhan PDRB *c-to-c* se-Sumatera Triwulan II-2015

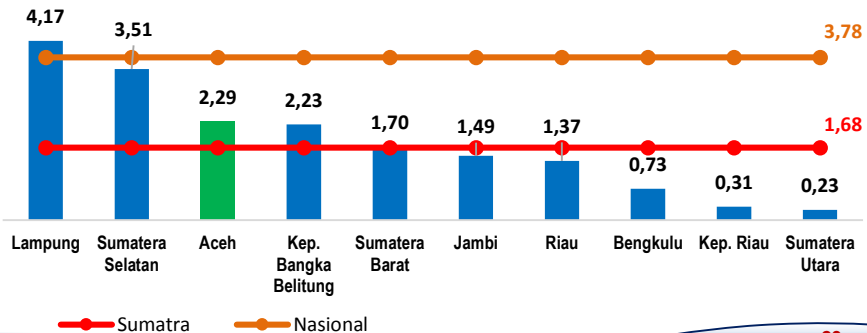


Pertumbuhan ekonomi Aceh jauh lebih baik secara *q-to-q*, dimana pada triwulan II-2015 perekonomian Aceh mampu tumbuh sebesar 2,29 persen dari triwulan I-2015 dan menempati urutan ke tiga se-Sumatera

setelah Lampung dan Sumatera Selatan. Di triwulan II-2015 perekonomian Sumatera sendiri tumbuh sebesar 1,68 persen, lebih rendah dari Nasional yang tumbuh sebesar 3,78 persen dari triwulan I-2015.

Gambar 10.

Pertumbuhan PDRB *q-to-q* se-Sumatera Triwulan II-2015



Tabel 1.

**PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran
(Triliun Rupiah)**

Komponen (1)	2014			2015	
	II (2)	III (3)	IV (4)	I (5)	II (6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	18,09	19,65	20,12	20,23	20,42
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,62	0,57	0,62	0,61	0,62
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	7,13	8,57	11,59	6,28	8,41
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	10,76	11,04	11,26	11,06	11,17
5. Perubahan Inventori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ekspor Luar Negeri	2,72	1,71	1,84	0,63	0,42
7. Impor Luar Negeri	0,88	0,80	0,59	0,90	0,70
8. Net Ekspor Antar Daerah	-5,70	-7,38	-12,14	-5,78	-7,27
P D R B	32,74	33,36	32,69	32,12	33,07

Tabel 2.

**PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran
(Triliun Rupiah)**

Komponen	2014			2015	
	II	III	IV	I	II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	15,48	15,76	15,86	15,82	15,92
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,54	0,49	0,50	0,49	0,50
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	5,21	5,80	7,82	4,27	5,65
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	9,10	9,30	9,42	9,14	9,09
5. Perubahan Inventori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ekspor Luar Negeri	1,53	1,11	1,28	0,46	0,30
7. Impor Luar Negeri	0,67	0,60	0,40	0,61	0,48
8. Net Ekspor Antar Daerah	-2,63	-2,95	-6,16	-2,10	-2,89
P D R B	28,57	28,90	28,32	27,45	28,08

Tabel 3.

Laju Pertumbuhan *y-on-y* PDRB Atas Dasar Harga Konstan
2010 Menurut Pengeluaran (Persen)

Komponen	2014			2015	
	II	III	IV	I	II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3,67	3,62	3,35	3,32	2,85
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	29,23	9,73	2,55	-8,14	-8,94
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2,81	2,62	-2,29	-9,04	8,34
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	8,12	5,46	1,59	-1,05	-0,15
5. Perubahan Inventori	-100,41	-99,71	-99,29	-9,64	-155,50
6. Ekspor Luar Negeri	-20,46	-26,35	1,19	-43,56	-80,47
7. Impor Luar Negeri	103,16	128,80	7,42	51,80	-28,88
8. Net Ekspor Antar Daerah	-0,28	-2,83	10,27	-1,11	10,03
P D R B	2,62	2,16	0,04	-2,12	-1,72

Tabel 4.

Laju Pertumbuhan c-to-c PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Persen)

Komponen	2014			2015	
	II	III	IV	I	II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3,41	3,48	3,45	3,32	3,08
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	28,77	22,14	16,77	-8,14	-8,54
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	7,87	5,87	3,01	-9,04	0,11
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	10,18	8,54	6,69	-1,05	-0,60
5. Perubahan Inventori	-100,25	-100,53	-96,44	-9,64	-97,24
6. Ekspor Luar Negeri	-38,01	-34,69	-27,78	-43,56	-67,74
7. Impor Luar Negeri	77,48	93,08	67,57	51,80	1,56
8. Net Ekspor Antar Daerah	10,02	4,72	7,11	-1,11	5,05
P D R B	2,21	2,19	1,65	-2,12	-1,92

Tabel 5.

Laju Pertumbuhan *q-to-q* PDRB Atas Dasar Harga Konstan
2010 Menurut Pengeluaran (Persen)

Komponen	2014			2015	
	II	III	IV	I	II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1,11	1,78	0,68	-0,28	0,65
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2,65	-10,21	1,49	-1,80	1,76
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	11,06	11,29	34,78	-45,40	32,28
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	-1,43	2,24	1,24	-3,01	-0,54
5. Perubahan Inventori	50,35	-34,34	575,93	-86,46	-192,35
6. Ekspor Luar Negeri	89,97	-27,77	15,13	-64,27	-34,25
7. Impor Luar Negeri	65,05	-9,56	-34,51	55,30	-22,68
8. Net Ekspor Antar Daerah	23,93	12,14	108,68	-65,90	37,90
P D R B	1,88	1,15	-2,02	-3,06	2,29

Tabel 6.

**Indeks Harga Implisit PDRB Menurut Pengeluaran
(2010=100)**

Komponen (1)	2014			2015	
	II (2)	III (3)	IV (4)	I (5)	II (6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	116,86	124,71	126,82	127,89	128,23
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	114,52	117,06	124,30	125,41	125,60
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	136,79	147,77	148,23	147,08	148,96
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	118,19	118,67	119,56	121,00	122,94
5. Perubahan Inventori	117,56	113,19	118,54	120,13	122,45
6. Ekspor Luar Negeri	177,10	153,94	144,23	137,67	140,49
7. Impor Luar Negeri	131,81	132,50	148,83	145,88	146,28
8. Net Ekspor Antar Daerah	216,60	250,15	197,23	275,24	251,30
P D R B	114,58	115,42	115,44	117,03	117,77

Tabel 7.

Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit PDRB Menurut Pengeluaran (Persen)

Komponen	2014			2015	
	II	III	IV	I	II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	-0,05	6,72	1,69	0,84	0,26
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	0,05	2,21	6,19	0,89	0,16
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,42	3,03	0,31	-0,78	1,28
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	0,70	0,40	0,75	1,20	1,60
5. Perubahan Inventori	-5,37	-3,72	4,73	1,35	1,93
6. Ekspor Luar Negeri	3,73	-13,08	-6,31	-4,55	2,05
7. Impor Luar Negeri	-2,42	0,52	12,33	-1,98	0,27
8. Net Ekspor Antar Daerah	-4,96	15,49	-21,16	39,55	-8,70
PDRB	1,47	0,73	0,02	1,38	0,64

Tabel 8.

Distribusi Persentase Komponen Pengeluaran Terhadap
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

Komponen (1)	2014			2015	
	II (2)	III (3)	IV (4)	I (5)	II (6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	55,26	58,91	61,54	62,97	61,73
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,90	1,71	1,89	1,90	1,88
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	21,78	25,69	35,45	19,54	25,43
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	32,86	33,10	34,45	34,41	33,78
5. Perubahan Inventori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ekspor Luar Negeri	8,30	5,11	5,63	1,95	1,27
7. Impor Luar Negeri	2,69	2,40	1,80	2,79	2,10
8. Net Ekspor Antar Daerah	-17,41	-22,13	-37,15	-17,99	-22,00
P D R B	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<http://aceh.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI ACEH

Jln. Tgk. H. M. Daud Beureueh No. 50 Banda Aceh

Telp. (0651) 23005 Fax. (0651) 33632

<http://www.aceh.bps.go.id> Email: bps1100@bps.go.id